



**PERENCANAAN RETRIBUSI PARKIR UNTUK MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)  
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu  
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh :

**MOHAMMAD IMAM ROBBANI**

2119500011

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Imam Robbani

NPM : 2119500011

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PERENCANAAN RETRIBUSI PARKIR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022** adalah benar-benar dibuat dan disusun sendiri bukan buatan hasil karya orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain yang tingkat kemiripannya 90% dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah saya lakukan. Maka saya bertanggungjawab atas keseluruhan skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran.

Brebes, Oktober 2023  
Yang Menyatakan



MOHAMMAD IMAM ROBBANI  
NPM. 2119500011



**PERSETUJUAN**

**PERENCANAAN RETRIBUSI PARKIR UNTUK MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)  
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu  
Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Tegal, 26 Oktober 2023

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si.  
NIP. 196305271988032001

Dosen Pembimbing II

Dra. Erny Rosyanti, M.Si  
NIPY. 3852391959

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Akhmad Habibullah, M.IP.  
NIPY 314622111994



UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)  
Jalan Halmahera Km 1 Kota Tegal 52121 Telp (0283)323290

PENGESAHAN

PERENCANAAN RETRIBUSI PARKIR UNTUK MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Pada Hari : Kamis

Tanggal : 26 Oktober 2023

1. Ketua Dewan Penguji : Arif Zainudin, S.IP., M.IP. (  )  
NIPY. 20964101988
2. Sekretaris Dewan Penguji : Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si. (  )  
NIP. 196305271988032001
3. Anggota Dewan Penguji : Dra. Emy Rosyanti, M.Si. (  )  
NIPY. 3852391959

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



## **MOTTO**

“Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al Mujadalah 11)

“Posisi apapun sama sekali bukan tujuan. Tidak menjadi apapun juga tidak masalah. Tidak dikenal orang juga tidak masalah. Tidak di akui keberadannya juga tidak masalah. Tidak di hormati juga tidak masalah. Justru bisa bersembunyi dari perhatian banyak orang malah lebih leluasa dan santai”

(Gus Baha)

“Hidup gausah di buat sulit, gausah ruwet, asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup.”

(Gus Baha)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat dan karunianya yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan kuliah dari awal semester sampai penyelesaian penyusunan skripsi ini.
2. Teruntuk Kedua orang tua saya Bapak Abdulloh dan Ibu Siti Kholifah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta selalu memberikan Do'a, dan semangat untuk saya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan rasa sayang, cinta dan rasa syukur saya untuk kedua orang tua saya.
3. Teruntuk istriku tercinta Gita Oktavianika yang selalu memotivasi dan selalu memberikan semangat untuk saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teruntuk kedua dosen pembimbingku yang telah memberikan ilmu dan arahan-arahan untuk saya dengan sabar sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Teruntuk semua dosen, Dekan Fisip, serta staf TU yang sudah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman angkatan 2019 Program Studi Ilmu Pemerintahan yang baik dan selalu membantu selama masa perkuliahan.
7. Yang terakhir, untuk diri saya sendiri yang mempunyai tekad dan semangat yang kuat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

## ABSTRAK

Nama : Mohammad Imam Robbani, NPM : 2119500011, *Judul* : *Perencanaan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2022*. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, 2023. Pembimbing I: Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si, dan Pembimbing II: Dra. Erny Rosyanti, M.Si.

Perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan salah satunya dalam mengatur keuangan pajak dan retribusi. retribusi parkir menjadi salah satu retribusi yang berpotensi dalam menyumbangkan kontribusinya terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Tegal. Pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Tegal masih belum mencapai target yang ditentukan dikarenakan kondisi riil di lapangan disebabkan masih adanya perbedaan biaya parkir, juru parkir yang tidak menyerahkan secara penuh seluruh uang parkirnya, dan sebagainya. Sehingga perlu adanya peningkatan untuk mengelola parkir di setiap titiknya dengan beberapa perencanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan, yaitu penetapan target, pendataan dan penertiban titik lokasi parkir, survey titik lokasi parkir yang memiliki potensi agar berizin, mensosialisasikan e-retribusi parkir, menerapkan e-retribusi parkir, melakukan pengawasan titik parkir, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara yang dilakukan pada 3 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah dapat dikatakan baik sesuai fungsi manajemen yang ada. Tetapi memang terdapat kendala yaitu tidak adanya payung hukum tentang retribusi parkir, tidak adanya kajian mengenai retribusi parkir, kurangnya jumlah pegawai Dinas Perhubungan dan pola pikir SDM juru parkir.

**Kata Kunci : Perencanaan, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah**

## ABSTRACT

*Name: Mohammad Imam Robbani, NPM: 2119500011, Title: Parking Levy Planning to Increase Regional Original Income in the Tegal Regency Transportation Service in 2022. Thesis, Government Science, Pancasakti University, Tegal, 2023. Supervisor I: Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si, and Supervisor II: Dra. Erny Rosyanti, M.Si.*

*Planning is a series of decisions made as guidelines that serve as a benchmark for implementing activities to achieve a desired goal. In implementing regional autonomy, regions have the authority, one of which is to regulate financial taxes and levies. Parking levies are one of the levies that have the potential to contribute to increasing PAD in Tegal Regency. Parking levy income in Tegal Regency has still not reached the specified target due to real conditions in the field due to differences in parking fees, parking attendants not handing over all their parking fees in full, and so on. So there is a need to improve parking management at each point with several plans carried out by the Transportation Department, namely setting targets, collecting data and controlling parking location points, surveying parking location points that have the potential to be licensed, socializing parking e-retribution, implementing parking e-retribution , supervising parking points, training and developing human resources.*

*The research method used in this research is descriptive qualitative and data collection techniques in the form of observations and interviews conducted with 3 informants. The research results show that the parking levy planning carried out by the Transportation Department can be said to be good according to existing management functions. However, there are obstacles, namely the absence of a legal umbrella regarding parking fees, the absence of studies regarding parking fees, the lack of number of Transportation Service employees and the mindset of human resources for parking attendants.*

**Keywords: Planning, Parking Levy, Regional Original Income**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi saya dengan judul “Perencanaan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2022.”

Penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal.

Saya menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat dukungan, bantuan, bimbingan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan ketulusan hati, saya menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Unggul Sugi Harto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi masukan serta dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dra. Erny Rosyanti, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar memberikan arahan serta memberi semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik.
5. Akhmad Habibullah, M.IP., selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal.

6. Seluruh Dosen, staff, dan seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan dukungan selama perkuliahan.
7. Bapak Muhammad Budi Eko Setiawan, ST., MM. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yang telah memberikan izin peneliti dalam melaksanakan penelitian.
8. Ibu Dyah Intan Prihartiwi S.E., MM. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian.
9. Bapak Subuh Sumaryono, S.IP. selaku Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dan Bapak Bayu Atmowiyanto, S.ST., MM. selaku Seksi Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian.
10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat saya harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis juga bagi para pembaca.

Brebes, Oktober 2023  
Penulis

Mohammad Imam Robbani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	11
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
II.1 Kerangka Teori.....	13
II.1.1 Penelitian Terdahulu.....	13
II.1.2 Manajemen .....	16
II.1.3 Perencanaan.....	17
II.1.3.1 Pengertian Perencanaan.....	17

II.1.3.2 Fungsi Perencanaan .....	20
II.1.4 Retribusi Daerah .....	22
II.1.4.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	22
II.1.4.2 Jenis Retribusi .....	23
II.1.5 Pengertian Retribusi Parkir.....	26
II.1.6 Pendapatan Asli Daerah .....	26
II.2 Definisi Konsep .....	27
II.3 Pokok-Pokok Penelitian .....	27
II.4 Alur Pikir Penelitian .....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

III.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
III.2 Lokus Penelitian.....	30
III.3 Jenis dan Sumber Data .....	30
III.4 Informan Penelitian .....	31
III.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
III.6 Teknik Analisis Data.....	33

### **BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

IV.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Tegal .....	35
IV.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Tegal .....	35
IV.1.2 Keadaan Geografis.....	36
IV.1.3 Luas Wilayah .....	36
IV.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.....	37
IV.2.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.....	38

IV.2.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal .....	39
IV.2.3 Tugas dan Fungsi Struktur Dinas Perhubungan	
Kabupaten Tegal .....	39
IV.2.4 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan	
Kabupaten Tegal .....	49
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
V.1 Hasil Penelitian .....	52
V.2 Pembahasan .....	64
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
VI.1 Kesimpulan .....	70
VI.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal .....	5
Tabel 1.2. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tegal Tahun 2019-2021 .....	6
Tabel 1.3. Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Tegal Tahun 2019-2021 .....	7
Tabel 1.4. Rekapitulasi Data Perparkiran Kabupaten Tegal Tahun 2020.....	8
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 4.1. Struktural dan Fungsional PNS pada Dinas Perhubungan .....	50

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Alur Pikir.....	28
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Tegal.....	37
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berjalannya sistem pemerintahan di Indonesia kini menerapkan sistem otonomi daerah. Dalam penerapannya otonomi daerah saat ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang/ UU yakni UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut menjadi titik awal kemandirian sebuah daerah yang diberi keleluasaan untuk mengatur urusan dan kewenangannya sendiri termasuk dalam membuat kebijakan (Peraturan Daerah), penataan lingkungan, hingga pengelolaan keuangannya agar dapat mandiri dan menyerap aspirasi masyarakat. Terlaksanakannya otonomi daerah di seluruh Indonesia, bertujuan agar daerah mampu untuk merencanakan serta menjalankan segala kegiatan yang dinilai dapat menunjang pembangunan daerah tersebut secara mandiri (Ekaryn et al., 2022).

Menurut Widjaja dalam (Khanza, 2021) mengungkapkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan. Maka dari itu kewenangan yang diberikan kepada daerah di era otonomi sekarang memungkinkan masyarakat lebih terakomodir kebutuhannya oleh pemerintah baik pusat hingga daerah dan desa.

Termasuk dalam hal keuangan, ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.



Arah hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ke depan telah ditetapkan melalui Undang-Undang tersebut yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu pembagian sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan pempus dan pemda yang terjaga keterbukaannya, akuntabel dan adil untuk pemeratakan kesejahteraan di tingkat lokal.

Salah satu hal penting dalam pengelolaan keuangan adalah tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut (Yani, 2013) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan daerah berasal dari pajak provinsi, pajak negara, penyelenggaraan perekonomian daerah dan ketersediaan dana daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan daerah dalam menghimpun dana bagi pelaksanaan hak daerah. Dalam PAD terdapat salah satu komponen di dalamnya yakni adalah retribusi daerah.

Menurut Sarwendah Suciati dalam (Risnawati, 2021), Retribusi daerah merupakan pungutan dari masyarakat disuatu daerah atas jasa yang sudah dipergunakan/dimanfaatkan yang merupakan bentuk pembayaran atas pemberian izin tertentu yang sudah disediakan oleh pemerintah guna memnuhi kepentingan

orang pribadi atau badan. Penerimaan daerah berupa retribusi daerah merupakan bentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang potensial dan bisa dipupuk atau dikembangkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Retribusi daerah terdiri dari 1) Retribusi jasa umum, 2) retribusi jasa usaha, dan 3) Retribusi perizinan tertentu.

Retribusi daerah di kabupaten Tegal telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah mengatur diantara tentang retribusi jasa umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan sebagainya. Penelitian ini berfokus pada perolehan retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Setiaji & Santoso, 2019). Lokus penelitian ini ada di kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal karena wilayah tersebut adalah wilayah yang memperoleh PAD terbanyak se-kabupaten Tegal.

Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Selanjutnya menurut Sukanto dalam (Elsye, 2022) menjelaskan bahwa definisi dari parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda, sepeda motor dan lain sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut. Dari beberapa pengertian diatas yang telah dijelaskan maka penulis menarik kesimpulan bahwa parkir adalah suatu keadaan kendaraan

bermotor yang sedang berhenti atau sedang tidak bergerak yang berada dalam suatu ruang lingkup atau tepi jalan umum atau dibahu jalan.

Kabupaten Tegal sendiri merupakan salah satu wilayah daerah yang memiliki potensi lahan parkir yang cukup memadai dan dengan jumlah pengendara motor yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal pada tahun 2022, Tegal memiliki areal lokasi parkir sekitar 347 titik lokasi yang terbagi atas 18 kecamatan, serta juru parkir sejumlah 416 orang. Mengenai hal tersebut retribusi parkir menjadi salah satu retribusi yang berpotensi dalam menyumbangkan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah.

Diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 dan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan tempat parkir maka seharusnya meningkatkan retribusi parkir. Tarif yang dipungut atas retribusi parkir tepi jalan umum dibedakan menjadi empat golongan, yaitu :

Tabel 1.1  
 Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum  
 Kabupaten Tegal

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp) /SEKALI PARKIR	KETERANGAN
1.	Kendaraan Bermotor Roda Dua/Tiga	Kendaraan	1.000	Berlaku
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat (Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya)	Kendaraan	2.000	1x 24 Jam
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat/Enam (Truck, Bus dan sejenisnya)	Kendaraan	4.000	Per Satu
4.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam atau lebih (Truck Gandengan dan sejenisnya)	Kendaraan	5.000	Titik Parkir

*Sumber : Perda Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021*

Dalam hal pengelolaan retribusi parkir ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu Dinas perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah sebagai pelaksana kebijakan, juru parkir dan kordinator lapangan sebagai pelaksana, Adapun salah satu perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam menangani permasalahan retribusi parkir yaitu melakukan inovasi dengan menerapkan e-retribusi parkir yang disebut dengan **APIKEPOL** (Alat Perlengkapan Parkir Elektronik Pembayaran Online). E-retribusi merupakan pemungutan retribusi secara elektronik dan bisa langsung masuk ke rekening kas daerah, karena sebelum adanya e-retribusi pembayaran retribusi parkir membutuhkan waktu yang lama dan panjangnya jalur birokrasi pembayaran dari juru parkir hingga ke rekening kas daerah sehingga rawan akan kebocoran

pendapatan parkir. Salah satu dampak positif dari diterapkannya e-retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal ke depan nantinya dapat mengurangi timbulnya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dengan adanya sistem yang baru pendapatan retribusi parkir bisa langsung masuk ke rekening kas daerah. Hal ini akan memudahkan dalam pemantauan dan menjamin transparansi pengelolaannya. Ketika PAD dikelola dengan baik dan terjaga akuntabilitasnya maka masyarakat akan percaya kepada pemerintah kabupaten Tegal dan terus berpartisipasi untuk meningkatkan PAD.

Menurut data dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tegal, Pendapatan Asli Daerah pada tiga tahun terakhir meningkat. datanya sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di  
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2019	416.867.970.000
2020	433.822.920.000
2021	458.043.751.000

Berdasarkan data yang ada di atas dapat dilihat angka PAD naik dari tahun ke tahun. Tahun 2019 ke tahun 2020 naik sekitar 17 miliar. Tahun 2020 ke tahun 2021 sekitar 25 miliar. Ada peningkatan walaupun tidak terlalu banyak. Hasil itu dapat dikatakan sudah baik karena ada meningkat. Data yang ditemukan mengenai retribusi parkir adalah seperti di bawah ini.

Tabel 1.3  
Target dan Realisasi Retribusi Parkir  
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	Presentase Tercapai
2019	1.000.000.000	477.161.000	47.72
2020	664.500.000	509.211.000	76.63
2021	664.500.000	579.614.000	87.23

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal*

Jika melihat data yang ada di tabel tersebut, realisasi pada target telah mengalami kenaikan dapat dikatakan baik karena ada kenaikan dari sekitar 47%, kemudian 76% dan 87%. Dari data tersebut penulis menyimpulkan bahwa angka retribusi parkir termasuk kecil yang dibandingkan dengan PAD kabupaten Tegalnya yaitu di angka kurang dari 1%. Angka kurang dari 1% misalnya tahun 2019 dapat dilihat dari data realisasi retribusi parkir di angka sekitar 477 juta sedangkan PAD nya mendapat sekitar 416 miliar. Dari data di atas, ada penurunan target di tahun 2020 dan tahun 2021, di karenakan target yang telah ditentukan masih terlampaui tinggi. Dalam hal ini target ditetapkan oleh DPRD Kabupaten dan Pemerintah daerah.

Target yang ditentukan tersebut masih belum tercapai dikarenakan kondisi riil di lapangan disebabkan adanya perbedaan biaya parkir antara satu tempat dengan tempat lainnya, banyaknya parkir liar, setoran dari juru parkir ke Dinas Perhubungan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan sebagainya. (Darari, R Slamet dalam (Awaliyah, 2021)

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan retribusi parkir pada tahun 2020, di kabupaten Tegal datanya sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Rekapitulasi Data Perparkiran  
Kabupaten Tegal Tahun 2020

No.	Kecamatan	Pendapatan Parkir Pertahun
1.	KRAMAT	Rp.64.512.000
2.	DUKUHTURI	Rp.21.024.000
3.	ADIWERNA	Rp.114.912.000
4.	TALANG	Rp.4.560.000
5.	LEBAKSIU	Rp.28.224.000
6.	PANGKAH	Rp.48.384.000
7.	JATINEGARA	Rp.9.504.000
8.	KEDUNGBANTENG	Rp.8.064.000
9.	BALAPULANG	Rp.42.048.000
10.	MARGASARI	Rp. 54.144.000
11.	SLAWI	Rp. 230.688.000
12.	BUMIJAWA	Rp. 51.840.000
13.	BOJONG	Rp.8.640.000
14.	SURADADI	Rp.5.472.000
15.	TARUB	Rp.4.032.000
16.	PAGERBARANG	Rp.1.440.000
	Total	Rp. 509.211.000

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kecamatan yang paling tinggi dapat retribusinya adalah Slawi yaitu Rp. 230.688.000. Angka lebih dari 230 juta tersebut berkali lipat daripada kecamatan lain yang hanya mendapat sekitar 48 jutaan. Perolehan retribusi parkir yang terendah adalah kecamatan Pagerbarang pada angka

1,4 jutaan. Kecamatan Slawi menjadi yang terbanyak dapat retribusi parkir karena daerahnya adalah daerah yang ramai pertokoan, Kawasan pusat kota yang padat penduduk dan kendaraan yang parkir di lingkungan pertokoan atau tempat keramaian yang ada di pinggir jalan. Jadi retribusi parkirnya banyak dan kondisi parkirannya ramai dari hari ke harinya. Dari data itu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan parkir sudah baik karena pendapatannya banyak.

Agar lebih baik perlu adanya peningkatan untuk mengelola parkir di setiap titiknya. Ada beberapa perencanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan, yaitu :

1. Penetapan Target
2. Pendataan dan penertiban titik lokasi parkir
3. Survey titik lokasi parkir yang memiliki potensi agar berizin
4. Mensosialisasikan e-retribusi parkir
5. Menerapkan e-retribusi parkir
6. Melakukan pengawasan titik parkir
7. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Tentunya perlu ditinjau ulang peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah perparkiran. Sementara itu, peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah masih belum terlaksana dengan semestinya. Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan dalam mengelola parkir mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Apabila pengelolaan retribusi parkir dikelola secara baik dan bertanggung jawab maka akan berdampak baik dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan kemajuan pada perekonomian serta pembangunan daerah. Dalam hal ini semakin terlihat bahwa retribusi parkir



memiliki pengaruh yang baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Tegal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengajukan judul : “Perencanaan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2022”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah langkah awal dalam menyusun berbagai tahapan yang akan dilaksanakan. Beberapa tahapan tersebut diantaranya adalah menggunakan aturan rujukan sejenis Peraturan Daerah maupun yang lainnya, memastikan kesiapan berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan hingga pengimplementasian, dan berikutnya adalah memastikan kesediaan lahan parkir beserta para pengelolanya yang menjadi ujung tombak bagi terkumpulnya retribusi parkir di tempat parkir yang telah ditentukan. Perencanaan ini mutlak dibutuhkan untuk memastikan kesiapan seluruh stake holder yang terlibat. Hal ini dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan kegagalan atau kebocoran anggaran. Sehingga, penerimaan yang didapatkan akan maksimal sesuai dengan target yang telah direncanakan. Melihat di lapangan, ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan maupun ketidakjujuran dari para petugas parkir yang berpotensi memangkas uang yang akan disetorkan kepada Dinas Perhubungan yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan dari sektor retribusi parkir. Perencanaan yang matang dan mendetail akan membuat pengimplementasian seluruh kebijakan retribusi parkir dapat maksimal. Selain itu, akan dapat memastikan uang dari masyarakat (dari setoran uang parkir) dapat dikelola dengan semestinya menjunjung tinggi asas keterbukaan sehingga dapat bermanfaat bagi pembangunan

di Kabupaten Tegal. Secara jangka panjang dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal tahun 2022?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal tahun 2022?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perencanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal tahun 2022.
2. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal tahun 2022.

#### **1.3.2 Manfaat penelitian**

Manfaat yang di peroleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang tata kelola retribusi dan manfaatnya bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

- b. Menambah literasi kepastakaan Universitas Pancasakti Tegal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat praktis
- a. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
  - b. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki kinerja dan berbagai upaya peningkatan retribusi daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 Kerangka Teori**

Dalam penulisan karya ilmiah kerangka teori adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Menurut Arikunto (2006:168), Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Teori-teori tersebut dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teori disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.

##### **II.1.1 Peneliti Terdahulu**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolok ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dalam penelitian yang akan dikerjakan sekarang. Penelitian sebelumnya memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini dan penulis juga telah menganalisis penelitian terdahulu berkaitan dengan bahasa dalam penelitian ini. Berikut tabel perbedaan penelitian terdahulu beserta kontribusi bagi penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

<b>Nama Peneliti</b>	Hilda Happy, Universitas Diponegoro, 2022
<b>Judul Penelitian</b>	Manajemen Parkir Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Kota Semarang

<p><b>Masalah Yang Diteliti</b></p>	<p>Pada penelitian ini masalah yang diteliti antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Perhubungan Kota Semarang</li> <li>- Hambatan dalam pelaksanaan manajemen parkir</li> </ul>
<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>Manajemen parkir untuk peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Perhubungan Kota Semarang masih belum maksimal hal ini dibuktikan dengan penerimaan retribusi parkir pertahun belum tercapai sesuai yang telah ditetapkan</p>
<p><b>Perbedaan Penelitian</b></p>	<p>Yang diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah manajemen parkir untuk peningkatan pendapatan asli daerah, sedangkan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah hanya salah satu fungsi manajemen yaitu perencanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.</p>

<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Bella Andani, Rila Kusumaningsih, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2022</p>
<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli</p>

	Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
<b>Masalah Yang Diteliti</b>	<p>Pada penelitian ini masalah yang diteliti antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran</li> <li>- Hambatan dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Serang.</li> </ul>
<b>Hasil Penelitian</b>	<p>Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap retribusi parkir Kota Serang dalam peningkatan pendapatan asli daerah belum maksimal dikarenakan retribusi sifatnya tidak memaksa seperti halnya pajak yang membuat pihak Dinas Perhubungan cukup kesulitan dalam menindak berbagai pelanggaran yang terjadi dilapangan.</p>
<b>Perbedaan Penelitian</b>	<p>Yang diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah salah satu fungsi manajemen yaitu pengawasan Dinas Perhubungan terhadap retribusi parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah, sedangkan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah salah satu fungsi manajemen yaitu perencanaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.</p>

## II.1.2 Manajemen

Manajemen merupakan sebuah proses saat seseorang dapat mengelola semua hal yang dikerjakan oleh individu atau dalam sebuah kelompok demi mencapai tujuan bersama dengan sumber daya yang tersedia. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Stoner, 1982:8). Dari definisi diatas stoner menggunakan kata proses yang mengandung arti bahwa hal itu adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa mempedulikan kecakapan atau ketrampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka yang diinginkan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Menurut George R. Terry dalam (Sukarna, 2011), Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dengan kata lain, terdapat adanya aktivitas-aktivitas khusus yang merupakan bagian daripada suatu proses manajemen. Disamping itu terdapat aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mrncapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan berlangsung dengan bantuan manusia dengan sumber-sumber daya lainnya. Ada empat fungsi dasar manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry, 1958 dalam bukunya

*Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10), yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

### **II.1.3 Perencanaan**

#### **II.1.3.1 Pengertian Perencanaan**

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang pertama harus dijalankan sebab dalam awal aktivitas perusahaan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan (Abe, 2005:27).

Menurut Tjokroamidjojo dalam (Syafalevi, 2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, dimana dan bagaimana cara melakukannya (Husaini Usman; 2008).



Menurut Hasibuan dalam (Fauzan, M. 2022) rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang di miliki oleh wilayah tersebut.

Menurut George R. Terry (dalam Sukarna, 2011: 10), Perencanaan dalam manajemen adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk merumuskan perencanaan manajemen yang lebih baik harus di tentukan langkah-langkah tertentu, yaitu :

1. Penetapan tujuan

Penetapan tujuan adalah proses memutuskan apa yang ingin di capai. Biasanya melibatkan pengembangan rencana tindakan, dengan tujuan yang lebih kecil dipecah menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, untuk mencapai tujuan itu.

2. Perumusan kegiatan-kegiatan

Rumusan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, merupakan hal yang sangat penting, karena dengan perumusan kegiatan yang baik, maka

diharapkan akan menghasilkan output yang maksimal.

### 3. Pemanfaatan sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Menurut Tjokroamidjojo (1996) mendefinisikan bahwa perencanaan program sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (output maksimal) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa, perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. Perencanaan program yang dilakukan tak ada lain adalah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan tiga tahap proses, yaitu:

- 1) Perumusan dan penentuan tujuan,
- 2) Pengujian atau analisis opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang tersedia serta
- 3) Pemilihan rangkaian, tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Dengan demikian diketahui bahwa perencanaan tidak bersifat statis melainkan dinamis kerana dilakukan melalui suatu rangkaian proses (siklus) yang berjalan terus menerus. Menurut Mardikanto (2010) tahapan perencanaan program, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data keadaan
- b. Analisis data keadaan

- c. Identifikasi masalah
- d. Pemilihan masalah yang akan dipecahkan
- e. Perumusan tujuan-tujuan
- f. Perumusan alternatif pemecahan masalah
- g. Perumusan cara mencapai tujuan
- h. Pengesahan program
- i. Rencana Evaluasi
- j. Rekonsiderasi

Perencanaan adalah proses memikirkan dan mengatur kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan melibatkan penciptaan dan pemeliharaan operasi organisasi tertentu. Proses pemikiran ini penting untuk penyempurnaan tujuan dan integrasinya dengan rencana lain.

Berdasarkan definisi-definisi yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan sesuai dengan langkah-langkahnya yakni penetapan tujuan, perumusan kegiatan-kegiatan dan pemanfaatan sumber daya manusia.

### **II.1.3.2 Fungsi Perencanaan**

Dalam kamus bahasa Indonesia kata fungsi merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut Sutarto dalam (Janice, A. (2014) Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan atau pertimbangan lainnya. Fungsi perencanaan itu merupakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang

berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan solidaritas nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab.

Menurut Siagian (2002:36) mengemukakan fungsi perencanaan dapat didefinisikan sebagai pengambilan keputusan pada masa sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam saat kurun waktu tertentu diwaktu dimasa yang datang. Menurut Siagian (2003: 90-91) proses perencanaan dapat ditinjau dari ciri-ciri suatu rencana yang baik, yakni :

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi.
3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami teknik-teknik perencanaan.
4. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti.
5. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
6. Rencana harus bersifat sederhana dan jelas.
7. Rencana harus luas.
8. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan.
9. Rencana harus bersifat praktis.

Jadi sebuah rencana itu sangat penting sekali dalam sebuah pembangunan karena merupakan sebuah keterampilan penting untuk suatu keberhasilan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam sebuah perencanaan waktu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perencanaan, dimana terdapat tiga hal penting dalam penggunaan waktu :

1. Waktu sangat diperlukan untuk melaksanakan perencanaan efektif,
2. Waktu sering diperlukan untuk melaksanakan perencanaan tanpa informasi lengkap tentang variable dan alternative, karena waktu diperlukan untuk mendapatkan data dan memperhitungkan semua kemungkinan,
3. Jumlah waktu yang akan dicakupkan dalam rencana harus dipertimbangkan.

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka panjang maupun jangka menengah membutuhkan kemampuan jenis- jenis lain dari perencanaan, selain harus memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan, dan institusi yang baik, perencanaan perumusan yang sistematis, maka segala upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien.

## **II.1.4 Retribusi Daerah**

### **II.1.4.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Marihot (2016:616) retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu atau secara khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan. Menurut Yoyo (2017:108) retribusi daerah pembayaran untuk layanan atau izin tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten untuk perorangan atau badan hukum. Sementara itu, menurut Windu (2018:185) retribusi daerah adalah iuran yang

dibayarkan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan untuk menerima pengembalian secara langsung.

Menurut Marihot P. Siahaan (2006:13), ada beberapa karakteristik yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke rekening kas pemerintahan daerah.
- c. Wajib pajak/orang akan menerima denda (kompensasi) langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
- d. Sanksi pembayaran bagi pengguna adalah sanksi ekonomi, artinya jika pengguna tidak membayar retribusi maka tidak akan mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah

#### **II.1.4.2 Jenis Retribusi**

Bersumber pada pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh individu atau badan.

Jenis retribusi umum adalah :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  - c. Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
  - d. Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
  - e. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  - f. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - g. Retribusi Pelayanan Pasar
  - h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - j. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta
  - k. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
  - l. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
  - m. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  - n. Retribusi Pelayanan Pendidikan
  - o. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ialah jasa yang diberikan secara komersial oleh pemerintah daerah, termasuk jasa yang menggunakan/memanen sumber daya daerah yang belum dimanfaatkan dan/atau jasa pemerintah daerah sampai dipasok oleh sektor swasta.

Jenis retribusi jasa usaha, yaitu :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- b. Retribusi Pasar dan/atau Grosir Pertokoan
  - c. Retribusi Tempat pelelangan
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - e. Retribusi Terminal
  - f. Retribusi Tempat Penginapan
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan
  - h. Retribusi rekreasi dan Olahraga
  - i. Retribusi Pelayanan pelabuhan
  - j. Retribusi Penyebrangan di Air
  - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah layanan perizinan khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan lokal, penggunaan sumber daya alam, sumber daya, infrastruktur atau peralatan yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan, kepentingan umum. ketahanan lingkungan.

Jenis perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan



### **II.1.5 Pengertian Retribusi Parkir**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Parkir juga diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan produktivitas lingkungan dan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah retribusi parkir yaitu menyelenggarakan pelayanan parkir tepi jalan umum sesuai dengan arahan pemerintah dan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011: 15), retribusi parkir merupakan bagian dari retribusi pelayanan publik, yaitu retribusi bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan umum, yang dapat dinikmati oleh perorangan atau satuan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

### **II.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pendapatan daerah merupakan peraturan daerah yang diakui sebagai kenaikan nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran tertentu. pendapatan daerah Berasal dari Dana Pendapatan Pokok Daerah Berkelanjutan dan pendapatan lain yang sah, dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Baldrick (2017:3), adalah pendapatan yang berasal dari daerah pemilihannya dan dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan provinsi yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan negara bagian. Peran

daerah memegang peranan penting dalam menunjukkan bahwa daerah memiliki kapasitas untuk mendukung pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah diperoleh dari penerimaan pajak daerah, hasil usaha daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan daerah lainnya yang sah.

## **II.2 Definisi Konsep**

Definisi konsep yang akan peneliti ajukan sebagai berikut:

- a. Perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan sesuai dengan langkah-langkahnya yakni penetapan tujuan, perumusan kegiatan-kegiatan dan pemanfaatan sumber daya manusia.
- b. Retribusi parkir adalah retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atas efisiensi penggunaan tempat parkir umum yang menggunakan ruang parkirnya sendiri dan/atau ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, pajak, hasil usaha daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan daerah lainnya yang disahkan (Mardiasmo, 2002:132).

## **II.3 Pokok-Pokok Penelitian**

Pokok-pokok penelitian adalah memberikan narasi agar penelitian ini secara substantif dapat mengarah kepada pembahasan yang lebih fokus. Fungsi pokok-pokok penelitian adalah untuk menjelaskan ukuran ataupun indikator penelitian

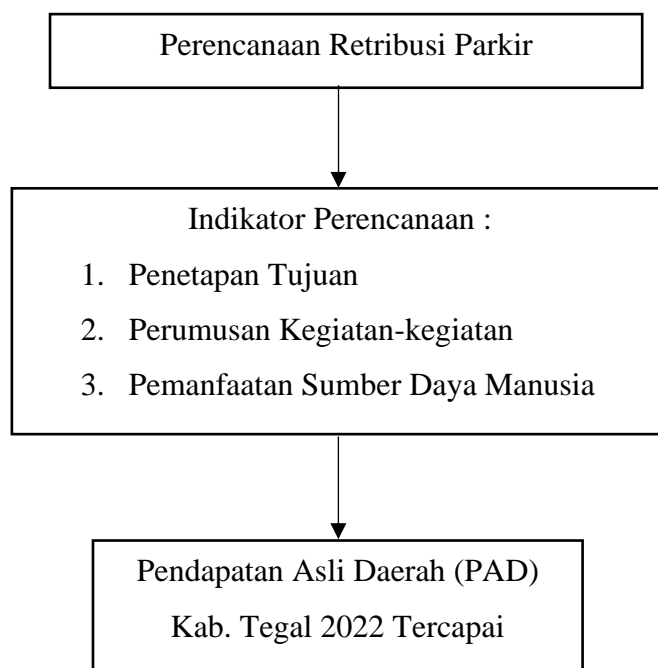
sehingga data yang diperoleh lebih konkret. Pada proposal penelitian ini yang menjadi pokok penelitian adalah:

Perencanaan retribusi parkir dapat dicermati dengan indikator sebagai berikut :

- a. Penetapan Tujuan
- b. Perumusan Kegiatan-kegiatan
- c. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

#### II.4 Alur Pikir

Gambar 2.1  
Alur Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari Sugiyono (2018:2), yang dimaksud dengan metode penelitian adalah landasan/ basis dari metode ilmiah guna mendapatkan informasi untuk mencapai tujuan dan penggunaan. Metode penelitian mengasumsikan bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada karakter yang masuk akal/ rasional, soft/ halus dan terstruktur secara sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian dijalankan dengan cara yang cerdas guna menjamin keberlangsungan hidup seseorang. Secara empiris, metode yang digunakan dapat dirasakan secara psikologis pada manusia sehingga orang bisa mengetahui metode yang diterapkan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengungkapkan situasi sosial, guna memahami sebuah fenomena tertentu secara realistis yang dibuat dengan deskripsi naratif dengan teknik yang tepat untuk mendapatkan data yang berasal dari keadaan alami (Moleong, 2016). Menurut (Sugiyono, 2018) mengelompokkan penelitian menurut eksplanasinya, terbagi menjadi penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif/ hubungan. Dalam penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif guna memperdalam pengetahuan suatu fenomena khusus atau untuk menemukan gejala-gejala tersebut bertujuan untuk mendapatkan temuan masalah yang lebih detail dan bisa untuk mengembangkan hipotesis, dikarenakan dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai Perencanaan Retribusi

Parkir di Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal pada tahun 2022.

### **III.2 Lokus Penelitian**

Lokus penelitian adalah lokasi spesifik yang akan menjadi objek penelitian dalam proposal ini. Dalam penelitian ini yang menjadi lokus penelitian adalah:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal
- b. Titik lokasi parkir di Kabupaten Tegal

### **III.3 Jenis dan Sumber Data**

Menurut (Sujarweni, 2014), sumber data adalah subjek dari mana data penelitian kita akan didapatkan. Berdasarkan sumber datanya dibagi menjadi:

#### **1. Data Primer**

Menurut (Sugiyono, 2018), data primer adalah sumber utama dari informasi yang diberikan kepada media dan dapat diketahui berbagai pihak. Sumber informasi yang utama dapat diperoleh dengan cara wawancara mendalam dengan membahas topik penelitian ini. Pada penelitian ini, data primer akan banyak didapatkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder menurut (Sugiyono, 2018) yaitu sumber informasi yang tidak memberikan informasi langsung kepada penerima informasi/ peneliti. Sebagai upaya untuk melengkapi informasi maka berbagai informasi diperlukan, misalnya aturan tertentu, website, dokumentasi dan berbagai data yang dibutuhkan dalam proposal riset ini. Dalam proposal penelitian ini, sumber data sekunder juga akan diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

### **III.4 Informan Penelitian**

Informan adalah pihak atau orang yang telah dipilih, dan kredibel serta mampu memberikan data, informasi dan keterangan mendalam terhadap objek yang sedang diteliti agar peneliti dapat memahami secara utuh dan lengkap. Dalam memilih informan ada berbagai pertimbangan yang harus dilakukan utamanya dalam menentukan siapa saja informan yang sekiranya menguasai data, dapat memberikan informasi mendalam tentang berbagai pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti agar memperoleh data yang beragam dan mendalam analisisnya. Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat atau mengetahui penuh tentang perencanaan retribusi parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Dalam penelitian ini pihak yang akan dijadikan sumber informan adalah :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran
3. Kepala Seksi Perparkiran

### **III.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi guna membuktikan berbagai bukti empiris yang mendukung penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dengan berbagai cara, antara lain :

1. Observasi

Menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2018), observasi menjadi dasar penting dalam melakukan penelitian. Peneliti dapat bekerja berdasarkan informasi yang

valid dalam memperoleh berbagai data dan keterangan. Tujuan dari cara pengumpulan data melalui observasi adalah untuk memperoleh informasi dan data tentang upaya-upaya yang sedang/ telah dilakukan. Observasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan turun langsung mengamati fenomena sosial dan data yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Observasi akan dilakukan peneliti pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

## 2. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2018), wawancara adalah komunikasi dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menggali informasi mendalam tentang tema penelitian. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara agar apa yang dibicarakan lebih terarah dan terstruktur. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Bidang Perparkiran, dan Kepala Seksi Perparkiran.

## 3. Metode Kepustakaan dan Dokumentasi

Metode perpustakaan dilaksanakan dengan cara membaca, menulis literatur, buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya untuk melengkapi informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dapat berupa gambar, dokumen atau berbagai peraturan perundang-undangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Menulis dokumen seperti buku harian, biografi, cerita, biografi, aturan dan prinsip. Tinjauan pustaka dan dokumentasi dapat mendukung penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018).

### III.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (2018:245) analisis data merupakan proses menganalisis data yang diperoleh setelah menyelesaikan pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, dokumentasi dan sebagainya, serta mencatat hasilnya, memilah dan mengklasifikasikannya, serta menginterpretasikannya.

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) mengemukakan berbagai teknik analisis data:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang pertama dan utama dalam pencarian informasi, data dan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi secara langsung dari data, baik dari dokumen maupun file.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Informasi yang ditemukan di lapangan cukup luas, sehingga harus dicatat secara cermat dan detail. Semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin banyak data yang tersedia, semakin kompleks dan kompleks. Untuk alasan ini, Anda perlu membuat analisis data dengan cepat sambil meminimalkan data. Reduksi data dapat didefinisikan sebagai gambaran umum, pemilihan elemen kunci, fokus pada elemen kunci, analisis dan pola kunci. Oleh karena itu, data yang disingkat akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan informasi tambahan. Minimal, individu peneliti akan dipandu oleh pencapaian tujuan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)



Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian teknis, informasi dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kelompok, urutan gambar, dan sebagainya. Dengan meninjau informasi, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, untuk merencanakan tindakan lebih lanjut atas dasar apa yang jelas.

#### *4. Conclusion Drawing/ Verification*

Keputusan dapat didasarkan pada hasil konsultasi yang dilakukan dan tersedia, dengan memperhatikan hasil konsultasi dan data berupa data yang sebelumnya tidak disiapkan untuk digunakan dalam penelitian, setelah dilakukan reduksi data. dan tanggal.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

Deskripsi wilayah penelitian merupakan suatu gambaran umum mengenai wilayah yang digunakan sebagai lokasi penelitian. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, kemudian memberikan gambaran umum lokasi penelitian, hal ini sangat membantu dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti.

#### **IV.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Tegal**

##### **IV.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Tegal**

###### **Visi**

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”.

###### **Misi**

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal

#### **IV.1.2 Keadaan Geografis**

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara 108°57'6 s/d 109°21'30 Bujur Timur dan 6°02'41 s/d 7°15'30 Lintang Selatan. Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi yang strategis di persilangan arus transportasi Semarang-Tegal-Cirebon dan Semarang-Tegal-Purwokerto dan Cilacap, dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal. Wilayah Kabupaten Tegal dari 18 wilayah Kecamatan, 6 Kelurahan dan 281 Desa. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tegal sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Brebes dan Kota Tegal

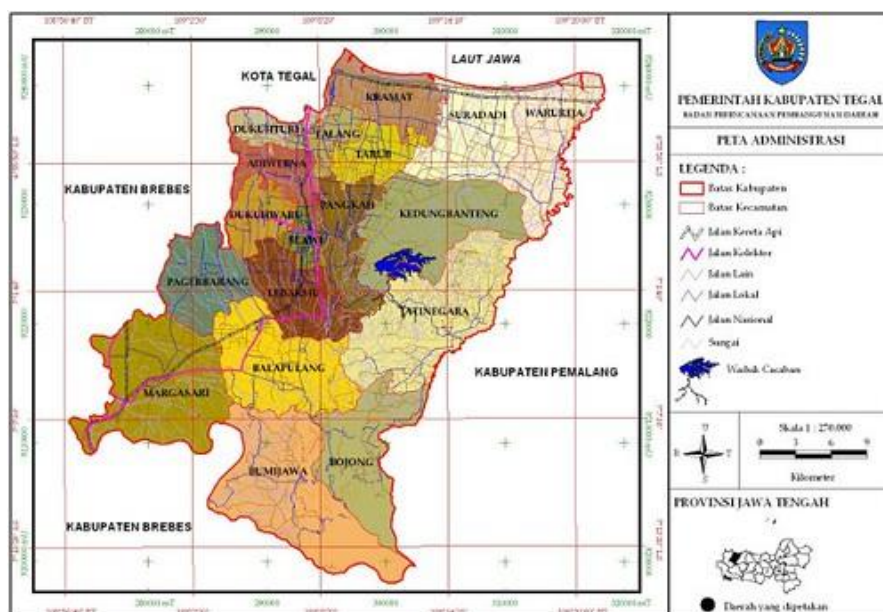
#### **IV.1.3 Luas Wilayah**

Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 878,79 km<sup>2</sup> yang berupa lahan sawah dan bukan lahan sawah, dibagi dalam 18 (delapan belas) Kecamatan, 6 (enam) Kelurahan dan 281 (dua ratus delapan puluh satu) Desa. Dengan rincian luas wilayah perkecamatan sebagai berikut : Kecamatan Margasari 86,84 km<sup>2</sup>, Kecamatan Bumijawa 88,55 km<sup>2</sup>, Kecamatan Bojong 58,52 km<sup>2</sup>, Kecamatan

Balapulang 74,91 km<sup>2</sup>, Kecamatan Pagerbarang 43,00 km<sup>2</sup>, Kecamatan Lebaksiu 40,95 km<sup>2</sup>, Kecamatan Jatinegara 79,62 km<sup>2</sup>, Kecamatan Kedungbanteng 87,62 km<sup>2</sup>, Kecamatan Pangkah 35,51 km<sup>2</sup>, Kecamatan Slawi 13,63 km<sup>2</sup>, Kecamatan Dukuhwaru 26,58 km<sup>2</sup>, Kecamatan Adiwerna 23,86 km<sup>2</sup>, Kecamatan Dukuhturi 17,48 km<sup>2</sup>, Kecamatan Talang 18,37 km<sup>2</sup>, Kecamatan Tarub 26,82 km<sup>2</sup>, Kecamatan Kramat 38,49 km<sup>2</sup>, Kecamatan Suradadi 55,73 km<sup>2</sup>, serta Kecamatan Warureja 62,31 km<sup>2</sup>.

Gambar 4.1

### Peta Administrasi Kabupaten Tegal



Sumber : [https://bappeda.tegalkab.go.id/?page\\_id=14](https://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=14)

## IV.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat

Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di bidang Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah di Kabupaten Tegal. Adapun fungsi dari Dinas Perhubungan adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Dinas Perhubungan juga memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti surat izin usaha angkutan, izin usaha angkutan umum dan lain sebagainya.

#### **IV.2.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal**

##### **Visi**

“Terwujudnya Kinerja Perhubungan Yang Handal Dalam Mendukung Pembangunan Daerah”.

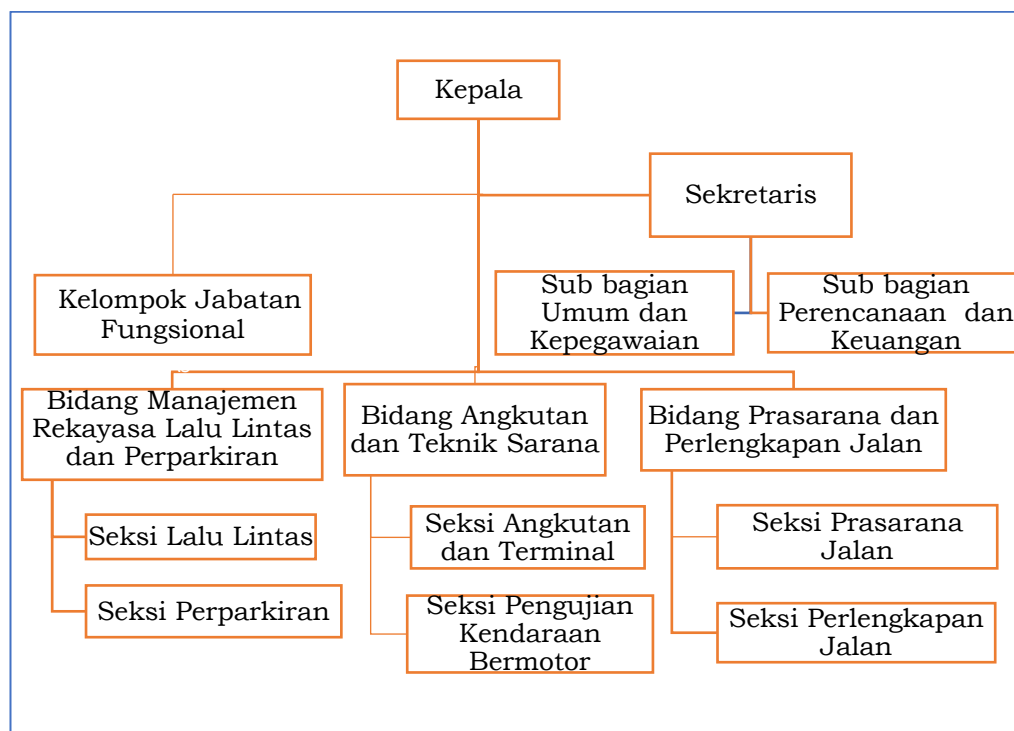
##### **Misi**

1. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan perhubungan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di bidang perhubungan.
3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan pelayanan publik.

4. Memperdayakan masyarakat di bidang perhubungan serta teknologinya.
5. Membangun sistem informasi perhubungan serta data yang cepat, tepat dan akurat.
6. Mewujudkan pelayanan prima dalam bidang teknologi perhubungan terhadap aparaturnya.
7. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan program pembangunan daerah secara optimal.

#### IV.2.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

Gambar 4.2



#### IV.2.3 Tugas dan Fungsi Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

Berdasarkan kewenangannya, tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

## 1. Kepala Dinas Perhubungan

Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dalam mendukung konektivitas wilayah dan keselamatan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. pengoordinasian dan pelaksana kebijakan Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. pengelolaan dan fasilitas program dan kegiatan Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dalam, mendukung tugas Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan

pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas;
- f. penyiapan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- i. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas.

### 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data sebagai bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan keuangan.



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penelaah data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. penelaah data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan dinas;
  - c. penelaah data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perhubungan;
  - d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dinas;
  - e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dinas;
  - f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang perencanaan, keuangan dan penganggaran;
  - g. penyiapan bahan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas;
  - h. pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
  - i. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - j. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di subbagian umum dan kepegawaian.

5. Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran

Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran;

- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran.

6. Kepala Seksi Lalu-Lintas

Kepala Seksi Lalu-Lintas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran untuk melakukan urusan Lalu-Lintas di dalam daerah kabupaten;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Lalu-Lintas mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Lalu-Lintas.

7. Kepala Seksi Perparkiran

Kepala Seksi Perparkiran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran untuk melakukan urusan Perparkiran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perparkiran mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas dan Perparkiran dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Perparkiran.

8. Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana

Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengaturan, pembinaan Angkutan dan Teknik Sarana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang angkutan dan teknik sarana;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan dan teknik sarana;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang angkutan dan teknik sarana;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang angkutan dan teknik sarana;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang angkutan dan teknik sarana;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang angkutan dan teknik sarana;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang angkutan dan teknik sarana.

#### 9. Kepala Seksi Angkutan Dan Terminal

Kepala Seksi dan Terminal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana dalam melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Pengelolaan Terminal yang menjadi kewenangan kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Angkutan dan Terminal.

#### 10. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana dalam melakukan pelayanan Teknik Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### 11. Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan

Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan, penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi Prasarana dan Perlengkapan Jalan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan memiliki fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan;

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan.

#### 12. Kepala Seksi Prasarana Jalan

Kepala Seksi Prasarana Jalan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan urusan Prasarana Jalan berupa lampu penerangan Jalan Umum;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Prasarana Jalan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, penyediaan, pembangunan, pemeliharaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Prasarana Jalan.

#### 13. Kepala Seksi Perlengkapan Jalan

Kepala Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan urusan Perlengkapan Jalan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, penyediaan, pembangunan, pemeliharaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perlengkapan Jalan yang meliputi perencanaan, penyediaan, pembangunan, pemeliharaan Rambu Lalu-Lintas, Marka Jalan, Traffic Cone, Water Barrier, Zoss, Zebra Cross, Lajur Sepeda, APILL dua warna (Warning Light), APILL tiga warna (Traffic Light), Speed Hump, Speed Table, Pagar Pengaman, Cermin Tikungan, Patok Lalu-Lintas, Pulau Lalu-Lintas dan Pita Penggaduh yang berada di ruas Jalan dan Persimpangan jalan kecuali di Perlintasan Sebidang Kereta Api dan Persimpangan jalan yang diatur oleh APILL yang menjadi kewenangan Kabupaten.

#### 14. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/ketrampilan tertentu dan dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja.

#### **IV.2.4 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal**

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

Per bulan Januari 2023 yaitu :

- Jumlah PNS : 50 orang
- Jumlah PTT : 1 orang
- Jumlah PHL : 94 orang
- Jumlah Petugas Jaga Lintas KA : 146 orang

Sedangkan berdasarkan latar belakang pendidikan PNS pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- S – 2 : 4 orang
- S – 1/ D – IV : 20 orang
- D – III : -
- D – II/ SMA : 21 orang
- SLTP : 4 orang
- SD/ MI : 1 orang

Sedangkan berdasarkan Pangkat dan Golongan PNS pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- Golongan IV : 4 orang
- Golongan III : 22 orang
- Golongan II : 23 orang
- Golongan I : 1 orang

Sedangkan berdasarkan Struktural dan Fungsional PNS pada Dinas Perhubungan adalah Pejabat Struktural : 11 orang dan Pejabat Fungsional : 3 orang.



Tabel 4.1

**Struktural dan Fungsional PNS pada Dinas Perhubungan**

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
1	Kepala Dinas	IV b	1
2	Sekretaris	IV a	1
3	Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu-Lintas	IV a	1
4	Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana	IV a	1
5	Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan	III d	1
6	Kapala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	III d	1
7	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian	III d	1
8	Kepala Seksi Lalu-Lintas	III c	1
9	Kepala Seksi Perparkiran	III c	1
10	Kepala Seksi Angkutan dan Terminal	III c	1
11	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	III d	1
12	Kepala Seksi Prasarana Jalan	III d	1
13	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan	III d	1
14	Staf		41

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal*